



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

RENJA 2026

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

*"MENUJU TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN
EFektif DAN Efiesien"*



setda.natunakab.go.id



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

- penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V PENUTUP.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI NATUNA,

ttd

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 440

Salinan sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM



EFEENDI, S.Sos
3104262010011014



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

RENJA 2026

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

*“MENUJU TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN
EFEKTIF DAN EFIESIEN”*



setda.natunakab.go.id

KATA PENGANTAR



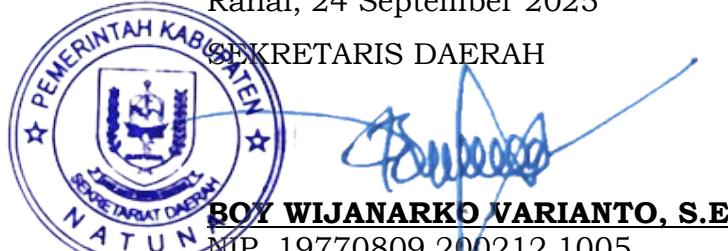
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2026. Dokumen ini disusun sebagai landasan perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perlu kami sampaikan bahwa penyusunan RENJA Tahun 2026 ini berada dalam masa transisi antara berakhirnya periode Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026 dan penyusunan Renstra periode berikutnya (2025–2029). Oleh karena itu, arah dan prioritas yang tertuang dalam dokumen ini masih mengacu pada sasaran akhir dari Renstra 2021–2026, sekaligus memperhatikan dinamika kebijakan serta kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Penyusunan RENJA ini juga dilaksanakan dalam konteks adanya kebijakan efisiensi anggaran yang terus diintensifkan oleh Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam merancang program dan kegiatan yang tetap adaptif, efektif, dan efisien. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal pada tahun 2026.

Akhir kata, kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan Rencana Kerja ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah, serta mencapai visi dan misi Kabupaten Natuna yang unggul dan sejahtera.

Ranai, 24 September 2025



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dikenal sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 16, Pasal 126, dan Pasal 131 yang mengatur secara sistematis tahapan penyusunan dokumen Renja. Adapun tahapan tersebut meliputi: (1) persiapan penyusunan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) perumusan rancangan akhir, dan (6) penetapan. Tujuan utama dari penyusunan Renja adalah untuk menjamin konsistensi dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan dalam kerangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 disusun sebagai dokumen operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan. Renja ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2022. Dengan demikian, penyusunan Renja Tahun 2026 berada dalam masa transisi menuju penyusunan Renstra periode 2025-2029, namun tetap mengacu pada arah kebijakan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra periode berjalan. Selain itu, penyusunan Renja ini juga

mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran yang masih menjadi arahan dari Pemerintah Pusat.

Tema RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah “Pemantapan Pembangunan Ekonomi Maritim dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Natuna yang Unggul dan Sejahtera”, yang menjadi landasan utama dalam penetapan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renja ini merujuk pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2022–2026, yaitu: (1) belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi dan aspek kebijakan, pengawasan, serta proses evaluasinya; (2) masih rendahnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi; dan (3) kurangnya koordinasi dan pemahaman OPD dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seluruh proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan sistematika sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
- 5) Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, odefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Natuna Nomor 31);
- 17) Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Darah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 440);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen operasional yang menjabarkan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 ke dalam rencana tahunan yang bersifat terukur dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan target dan sasaran pembangunan jangka menengah Sekretariat Daerah ke dalam rencana kerja tahunan yang lebih operasional dan realistik.
2. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026.
3. Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta koordinasi lintas sektor di tahun anggaran berjalan.
4. Meningkatkan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta evaluasi program dan kegiatan agar lebih terintegrasi dan akuntabel.
5. Menyediakan dasar bagi proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II.HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III.TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.3.Program dan Kegiatan

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan tahunan yang berkelanjutan. Evaluasi ini bertujuan untuk menelaah tingkat pencapaian kinerja pembangunan daerah, dengan mengacu pada hasil rekapitulasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta realisasi capaian Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun bersangkutan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Penilaian mencakup realisasi capaian output kegiatan, capaian kinerja program, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung target pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029.

Dengan dilaksanakannya evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai dasar perbaikan dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun

berjalan. Hasil evaluasi ini juga menjadi instrumen penting dalam menjamin konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, serta mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Daerah secara keseluruhan.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN	INDIKATOR	Target Renstra			Realisasi			Rata-rata Capaian
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Meningkatnya pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah	Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA	56%	95%	95%	94.82%	96.16%	96.55%	95.84%
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Daerah	75.00	76.15	76.90	73.84	73.98	74.31	74.04
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai EPPD dalam LPPD	3.32	3.33	3.34	3.31	2.09	3.17	2.86
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3.46	3.47	3.48	3.41	3.71	3.5	3.54

Tabel 2. Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2024

Program	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
		Kinerja 2024	2024	Kinerja 2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Indeks Kelembagaan	Nilai	68	71.5	105%
Nilai Laporan LKJIP	Nilai	78.55	63	80%
Persentase Pelayanan Kedinasan kepala Daerah	Persen	100	100	100%
Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	100	125%
Program Perekonomian dan Pembangunan				
Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	Nilai	56	81.44	145%
Persentase Realiasi Pelaksanaan Pembangunan	Persen	90%	68%	75%
Tingkat Inflasi Daerah	Nilai	3.03	2.09	69%
Program Pemerintah dan Kesejahteraan				
Persentase Pemenuhan Koordinasian Bidang Keagamaan	Persen	62	65	105%
Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA	Persen	3%	2.99%	100%
Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	83	68.22	82%
Persentase Kerjasama yang ditindak lanjuti	Persen	90	90	100%
Peningkatan Nilai LPPD	Persen	2.9	3.13	108%

Tabel 3. Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi	Capaian	Penjelasan
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	persentase realisasi kinerja perangkat daerah	85	79.3	93.3%	Realisasi anggaran Sekretariat
Kegiatan Adminsitrasir Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100.0%	Dihitung dari ketepatan waktu pembayaran gaji pokok
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	50	100	200.0%	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	100	133.3%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase peningkatan BMD	80	34.85	43.6%	
Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	100.0%	
Pemeliharaan BMD penunjang ursan pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarna prasarana	75	125	166.7%	
Administrasi Keuangan dan Operasional KDH-WKDH	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan operasional KDH-WKDH yang sesuai dengan kebutuhan	100	70	70.0%	
Kegiatan Penataan Organisasi	persentase perangkat daerah yang tata kelola baik	100	100	100.0%	
	persentase perangkat daerah yang tata laksana baik	100	100	100.0%	
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Agenda Protokoler terencana yang difasilitasi	86	100	116.3%	
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat	100	100	100.0%	
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Yang Diundangkan	73	96.69	132.5%	
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentasae Kerjasama yang di sepakati	90	120	133.3%	
Kegiatan Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	90	72.37	80.4%	Diukur dari capaian kinerja anggaran
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	60	100	166.7%	Diukur dari jumlah kebijakan yang disusun dibandingkan dengan rencana kebijakan
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	60	100	166.7%	Diukur dari jumlah kebijakan yang disusun dibandingkan dengan rencana kebijakan
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	90	58.29	64.8%	Diukur dari capaian kinerja anggaran
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	3.6	23.03	639.7%	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	15	27.92	186.1%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 hingga 2024, secara umum kinerja yang dicapai menunjukkan tren yang cukup baik. Dari empat sasaran strategis yang diukur (Tabel 4) melalui indikator kinerja utama, capaian kinerja kumulatif selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa mayoritas target tahunan telah direalisasikan mendekati atau melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam mendukung tujuan strategis organisasi.

Secara lebih rinci, sasaran peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah menunjukkan capaian kinerja tertinggi dengan nilai capaian sebesar 101,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program di bidang tersebut telah melampaui ekspektasi target tahunan. Di sisi lain, sasaran peningkatan pembinaan terhadap TPQ/TPA/MDA daerah berhasil direalisasikan sebesar 100,6%, yang juga mencerminkan kinerja yang sangat baik dan selaras dengan arah kebijakan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, sasaran terkait dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah menunjukkan capaian sebesar 96,6%, serta peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah yang hanya mencapai 87,1%, yang mengindikasikan masih adanya ruang untuk perbaikan dan optimalisasi pada aspek tersebut.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Renstra hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna telah mampu mempertahankan kinerja yang relatif stabil dan positif, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian sasaran tertentu. Hasil evaluasi ini menjadi bahan penting dalam perumusan Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas koordinasi, pengendalian, dan pelaporan kinerja di masa yang akan datang. Strategi penguatan sistem kerja internal, peningkatan kapasitas SDM, dan integrasi sistem informasi menjadi faktor kunci untuk mendorong capaian kinerja yang lebih optimal pada tahun perencanaan berikutnya

Tabel 4. Evaluasi Terhadap Capaian Renja Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024	Keterangan						
			I		II		III		IV												
			8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x 100	14=6+12	15=14/6x100						16					
SEKRETARIAT DAERAH																					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	0	12,060,384,554	0	11,851,398,202	85	12,078,889,558	0	5,195,717,482	35	41,186,389,796	41.18	75.84	203.89	82,534,061,187	239.87	243.94			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	5,880,719,936	1	6,253,945,179	1	4,760,580,321	0	3,800,127,427	30	20,695,372,863	3,000.00	92.28	131	39,265,479,664	13,100.00	200.28			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	150	5,880,719,936	150	6,253,945,179	129	4,760,580,321	0	3,800,127,427	139	20,695,372,863	92.67	92.28	783	39,265,479,664	522.00	200.28			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	0	21,179,318	0	606,477	81	404,318	0	606,477	40	22,796,590	88.89	82.25	298.33	96,434,481	662.96	1,285.79			
Pengadaan Pakai Dinas berserta Atribut Kelengkappanya	Jumlah Paket Pakai Dinas berserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	21,179,318	6	606,477	0	404,318	0	606,477	4	22,796,590	66.67	82.25	117.33	96,434,481	1,955.50	1,285.79			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	0	1,108,541,628	0	1,069,096,509	75.39	1,560,395,452	0	412,256,383	60	4,150,289,972	80.00	72.48	235	8,468,090,237	313.33	707.12			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	35,084,000	0	96,369,600	12	108,027,500	0	0	6	239,481,100	50.00	52.63	29.33	506,608,600	244.42	1,013.22			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	34,854,200	0	30,570,000	5	98,897,000	0	0	1	164,321,200	20.00	82.02	36	341,490,000	720.00	1,707.45			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	225,600,100	30	180,000,000	30	228,540,000	0	0	1	634,140,100	8.33	72.06	49	1,505,828,220	408.33	5,022.76			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	168,510,600	3	20,059,200	3	38,728,200	0	9,245,250	1	236,543,250	7.14	71.91	22	634,918,600	157.14	319.86			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	131	644,492,728	131	742,097,709	317	1,086,202,752	0	403,011,133	131	2,875,804,322	131.00	74.46	700.2	5,478,244,817	700.20	609.34			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	0	148,693,889	0	6,573,163	43	77,062,893	0	0	43	232,329,945	53.75	37.12	204.25	541,293,849	255.31	721.73			
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	148,693,889	0	6,573,163	2	77,062,893	0	0	2	232,329,945	200.00	37.12	9	541,293,849	900.00	721.73			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	1,304,104,939	100	1,490,854,803	100	1,462,016,131	0	982,727,195	100	5,239,703,068	100.00	84.08	255	10,738,622,662	255.00	188.82			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	16,500,000	3	7,345,000	3	25,630,000	0	0	6	49,475,000	50.00	78.63	4878	99,419,000	40,650.00	198.84			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	357,642,002	3	362,913,494	3	424,321,020	0	299,380,661	6	1,444,257,177	50.00	73.10	23	2,786,423,960	191.67	3,278.15			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	929,952,937	3	1,120,596,309	3	1,012,065,111	0	683,346,534	100	3,745,970,891	833.33	89.33	1593.53	7,852,779,702	13,279.42	141.44			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	0	1,926,457,634	0	1,135,607,619	71.89	1,710,502,213	0	0	30	4,772,567,466	42.86	55.52	205	9,956,621,797	292.86	1,229.21			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	1,675,232,834	18	705,559,069	25	1,105,489,973	0	0	18	3,486,281,876	46.15	60.12	227.9	7,120,044,683	584.36	1,396.09			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	67,452,100	8	262,146,350	6	460,236,940	0	0	8	789,835,390	133.33	57.03	120	1,714,547,914	2,000.00	623.47			
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	183,772,700	3	167,902,200	4	144,775,300	0	0	3	496,450,200	75.00	35.17	90	1,122,029,200	2,250.00	4,488.12			
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan	Persen	0	1,670,687,210	0	1,894,714,452	78.58	2,507,928,230	0	0	100	6,073,329,892	100.00	56.92	275	13,467,538,497	275.00	208.76			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	157,601,119	2	239,187,971	2	273,985,662	0	0	2	670,774,752	100.00	40.08	610	1,989,156,908	30,500.00	139.74			
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang		0		0		0		0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00				
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	1,513,086,091	2	1,655,526,481	2	2,233,942,568	0	0	2	5,402,555,140	100.00	60.05	610	11,476,381,589	30,500.00	232.94			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra 2024 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024	Keterangan						
			I	II	III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7 x 100											
3	4	4A	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x 100							16				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	221,158,435	100	370,069,626	100	181,370,106	0	0	100	772,598,167	100.00	53.52	200	1,339,749,892	200.00	61.06	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Agenda Protokoler Terencana yang terfasilitasi	Persen	86	221,158,435	86	370,069,626	0	181,370,106	0	0	86	772,598,167	101.18	53.52	166	1,339,749,892	195.29	61.06	
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	3	111,532,939	3	163,462,363	3	96,098,017	0	0	9	371,093,319	75.00	54.10	21	686,595,807	175.00	66.69	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	3	53,747,507	3	113,165,081	3	11,838,000	0	0	9	178,750,588	75.00	51.68	21	296,333,635	175.00	96.24	
Pendokumentasi Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasi Tugas Pimpinan	Laporan	3	55,877,989	3	93,442,182	3	73,434,089	0	0	9	222,754,260	75.00	54.08	21	356,820,450	175.00	41.65	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
SEKRETARIAT DAERAH																			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	Indeks	0	91,389,400	0	422,610,084	76.46	315,214,300	0	130,847,292	76	960,061,076	144.26	60.48	130.2	1,819,498,448	245.66	92.89	Tim telah melakukan konsolidasi serta sosialisasi berjasa berjalan
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persen	0	53,118,300	0	339,220,904	28.71	203,719,500	0	84,470,292	29	680,528,996	797.50	67.95	82.13	1,306,190,961	2,281.39	89.54	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	3	53,118,300	3	339,220,904	3	203,719,500	3	84,470,292	12	680,528,996	100.00	67.95	24	1,306,190,961	200.00	108.85	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang		0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	0	38,271,100	0	83,389,180	68.78	111,494,800	0	46,377,000	69	279,532,080	491.29	47.72	127.76	513,307,487	912.57	102.66	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	38,271,100	1	83,389,180	1	111,494,800	1	46,377,000	4	279,532,080	100.00	47.72	8	513,307,487	200.00	102.66	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
SEKRETARIAT DAERAH																			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	Persen	60	64,266,431	90	64,957,654	100	124,432,223	100	48,768,114	201	302,424,422	223.33	53.98	361	1,018,959,748	401.11	187.04	
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Yang Disepakati	Persen	60	64,266,431	90	64,957,654	100	124,432,223	100	48,768,114	180	302,424,422	200.00	53.98	370	1,018,959,748	411.11	187.04	Pengembangan strategi kerjasama dengan pihak terkait berjalan maksimal
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	6	64,266,431	3	25,023,800	6	102,668,002	3	10,531,000	18	202,489,233	180.00	45.58	57	726,130,298	570.00	205.06	
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen		0	0	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	0	0	0	39,933,854	0	21,764,221	1	38,237,114	1	99,935,189	100.00	86.20	5	292,829,450	500.00	268.76	

Tabel 5. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

SASARAN	INDIKATOR	Target Renstra			Realisasi			Capaian Kinerja %
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Meningkatnya pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah	Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA	56%	95%	95%	94.82%	96.16%	96.55%	101.6%
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Daerah	75.00	76.15	76.90	73.84	73.98	74.31	96.6%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai EPPD dalam LPPD	3.32	3.33	3.34	2.09	3.17	2.91	87.1%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masayarakat	3.46	3.47	3.48	3.41	3.71	3.5	100.6%

Realsisasi masing masing Indikator Sasaran diperoleh dengan memperhitungkan sebagai berikut :

a. Realisasi Indikator Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA

Realisasi diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan bantuan dana pembinaan dan operasional oleh Pemerintah Daerah pada rumah ibadah dan TPQ/TPA/MDA. Pada tahun 2024 Jumlah TPQ yang ditetapkan sebagai penerima Hibah berjumlah 29 TPQ/TPA/MDA. Dari 29 lembaga tersebut, 28 lembaga mengajukan proposal hibah dan menerima hibah bantuan operasional (96,55%). Jumlah rumah ibadah dan Kelembagaan keagamaan yang ditetapkan di dalam SK sebagai penerima hibah bantuan operasional berjumlah 357 yang terdiri Lembaga keagamaan 22, TPQ/TPA 29, Masjid 126, Surau 165, Gereja 11, vihara 2, Kelenteng 2. Jumlah rumah ibadah dan kelembagaan agama yang menerima hibah bantuan operasional hanya 292 atau sekitar 81,79% dari jumlah yang ditetapkan sebagai calon penerima. Yang terdiri Lembaga keagamaan 22, TPQ/TPA 28, Masjid 114, Surau 116, Gereja 10, Vihara 2, kelenteng 2.

b. Nilai SAKIP Daerah

Target 76.90 realisasi 74.31 belum mencapai target. Evaluasi SAKIP dinilai dari 4 Komponen, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi Akuntabilitas kinerja. Target belum tercapai disebabkan permasalahan dan kendala sebagaimana yang menjadi rekomendasi dari MENPANRB yaitu :

1. Dokumen perencanaan yang belum berorientasi hasil atau dampak langsung kepada masyarakat dan indikator kinerja yang belum memenuhi
2. Kualitas penetapan kinerja belum sempurna khususnya dalam memastikan bahawa target kinerja realistik, progresif setiap tahun dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik.
3. Belum memanfaatkan secara optimal tool E-Kejap dalam memantau capaian kinerja serta tingkat kepatuhan pengisiannya masih rendah sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan

pengukuran kinerja secara real time

4. Belum memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi dan target kinerja kedepan.
5. Kualitas laporan kinerja yang belum sempurna baik itu pada laporan kinerja tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah.
6. Belum memanfaatkan informasi kinerja dalam LAKIP Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas.

Tindak lanjut atas permasalahan dan kendala diatas dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja realisasi indikator adalah mengkoordinasikan bersama satkeholder dan jajaran pimpinan sekretariat daerah terkait rekomendasi evaluasi SAKIP. Kemudian menyusun langkah strategis pelaksanaan rekomendasi sesuai tanggungjawab dan wewenang unit kerja. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut, dan mereview hasil pelaksanaan kinerja apakah sudah sesuai rencana atau masih ada kendala.

c. Nilai EPPD

Realisasi indikator EPPD tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Natuna tahun 2020. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variable yaitu Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM). Target EPPD tahun 2024 adalah kategori sangat tinggi (skala 3-4). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian diperoleh nilai indeks EPPD adalah 2,91. Berdasarkan pengelompokan prestasi capain kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kabupaten Natuna masuk kategori berprestasi sedang (skala 1-2) dan belum tercapai target. Faktor penghambat dalam pencapaian nilai EPPD adalah sebagai berikut :

- Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan laporan lainnya menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya;
- Adanya data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari Perangkat Daerah menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.
- Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta.
- Adanya perbedaan petunjuk teknispedoman penyusunan LPPD dan kertas Kerja Evaluator sehingga PD sulit menentukan data mana yang dipakai;
- Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung yang akan dibina;
- Capaian kinerja yang disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indoensia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi.

d. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Nilai ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 3.48 dengan realisasi 3.5. Capaian nilai tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik dengan capaian 100.6.%.

Faktor Pendukung atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan public sesuai dengan standar pelayanan publik;

- Komitmen dari stakeholder dan ASN dalam memberikan pelayanan publik yang prima;
- Adanya dukungan sumberdaya anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah, telaahan terhadap visi misi Kepala Daerah Kabupaten Natuna, maka diperoleh isu-isu penting dalam perencanaan Pembangunan di Kabupaten Natuna yaitu :

a) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah masih belum optimal dan perlu mendapat perhatian serius, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil Pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/ *asset* pemerintah daerah, kurangnya kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, kurang intensnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kurang optimalnya penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan pengadaan barang dan jasa.

b) Kualitas sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Masyarakat Kabupaten Natuna diantaranya dilaksanakan melalui pembinaan mental keagamaan. Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku bermoral.

c) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi perumusan kebijakan kesejahteraan Masyarakat dan sosial

Kesejahteraan Masyarakat tidak terlepas dari isu kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan ditandai dengan naiknya angka kemiskinan Kabupaten Natuna. Pengangguran di Kabupaten Natuna mengalami sedikit penurunan. Angka kemiskinan dan Pengangguran yang ada menyebabkan pemerataan kesjehteraan / distribusi pendapatan dan ketimpangan cukup tinggi, hal ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan sinergitas perumusan kebijakan dalam penanganan dan peningkatan masalah kesejahteraan sosial.

d) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi perumusan penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada potensi sumber daya lokal

Isu penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada peningkatan potensi sumber daya lokal menjadi hal yang paling penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Penguatan potensi ini dilakukan melalui pengembangan usaha mikor kecil dan menengah agar mampu bertahan dan bertumbuh sebagai penopang perekonomian daerah.

Belum optimalnya perumusan kebijakan penguatan perekonomian menjadi salah satu faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan Kabupaten lain yang ada di Propinsi Kepulauan Riau.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kebijakan pelayanan publik dan meningkatkan kebijakan

bina mental spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Rancangan Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan rill Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan.

2.4. Penalaahan Terhadap Usulan Partisipatif Masyarakat

Dalam proses pembangunan daerah diperlukan partisipatif dari masyarakat sebagai bentuk keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan. Proses partisipatif ini dilakukan dalam bentuk kegiatan musyawarah rencana pembangunan (msrenbang) ditingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Dalam pelaksanaan proses Musrenbang di tingkat Kecamatan, terdapat beberapa usulan kegiatan dari Masyarakat/desa ke Sekretariat Daerah diantara ditujukan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat. Untuk lebih jelas disajikan pada table dibawah ini.

Tabel 6. Usulan Partisipatif Dari Masyarakat

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Volume	Catatan
1	Bantuan rumah ibadah masjid al-Muhajirin	Desa Payak, Serasan	1 Paket	
2	Bantuan Rumah Ibadah Masjid Al Jannah	Desa Payak, Serasan	1 Paket	
3	Pengadaan Karpet dan Ac Masjid An-Nahar	Desa Sungai Ulu	1 Paket	
4	Pengadaan karpet sajadah surau Fistabikul Khoirot RT002 RW001	Kelurahan Ranai Darat	Paket	
5	Pengadaan karpet sajadah Surau Ibnu Rohim RT 005 RW 001	Kelurahan Ranai Darat	Paket	
6	Pengadaan perlengkapan masjid batu ampar	Desa Arung Ayam, <small>Desa Air Nusa, Serasan Timur</small>	Paket	
7	Pengadaan Sajadah Masjid Al-Hijrah Rt.05 Rw.03	Desa Air Nusa, Serasan Timur	Paket	
8	Pengadaan Sajadah Masjid AL-ISTIQOMAH	Pering Bandarsyah	Paket	
9	Pengadaan Sajadah Masjid At-Taqwa	Desa Kelarik	Paket	
10	PENGADAAN SOUND SYSTEM MASJID AL MUHAJIRIN	Puak, Ranai	Paket	

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kualitas rencana Pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antara pusat, provinsi dan Kabupaten serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan Pembangunan daerah.

Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan setiap misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Lebih lanjut, sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna yang tertuang dalam dokumen Renstra juga harus sinergis mendukung pencapaian sasaran pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, sinergi perencanaan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perenanaan satu tahun. Berikut ini adalah keterhubungan dan keselarasan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dengan Resntra Sekretariat Daerah Provinsi.

Tabel 7. Keselarasan Sasaran Renstra Kemendagri, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

Renstra Kementerian Dalam Negeri 2024-2029	Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepri 2025-2029	Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 2025-2029
S.7. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional dan inovatif	S.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	T.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi
S.10. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	T.2. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif	

3.2. Telaahan Terhadap RPJMD Kabupaten Natuna Periode 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun 2026 berfokus pada tiga hal yaitu :

- 1) Pembangunan ekonomi daerah. Keterkaitan dengan fungsi Sekretariat Daerah adalah perumusan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Selain itu juga mengkoordinatori perangkat daerah terkait dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah
- 2) Penguatan tata kelola pemerintahan. Keterkaitan dengan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki wewenang penuh dan tanggungjawab dalam menjamin terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik. Meurmuskan kebijakan upaya peningkatan kinerja, serta kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Keterkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu perumusan

kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan SDM melalui peningkatan bina mental Masyarakat, menjalin Kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas SDM pegawai dan Masyarakat.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif mendukung mewujudkan misi 4: ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.***

Demi terwujudkanya visi misi Kabupaten Natuna RPJMD tahun 2025-2029 serta untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna menetapkan 1 (satu) tujuan yang merupakan turunan dari sasaran misi pada RPJMD seperti yang terlihat pada gambar 1 (satu).

Gambar 1. Tujuan Resntra Sekretariat Daerah



Tujuan strategis dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Upaya ini dilaksanakan secara sistematis melalui penguatan tata kelola berbasis data, integrasi sistem informasi kinerja, serta fasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka mendukung transparansi, efisiensi, dan responsivitas pelayanan. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui dua indikator utama, yaitu

- 1) Indeks Pelayanan Publik sebagai representasi mutu layanan kepada masyarakat, dan 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai cerminan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Renstra ini menjadi instrumen strategis dalam mendorong transformasi digital birokrasi daerah yang adaptif dan berorientasi hasil.

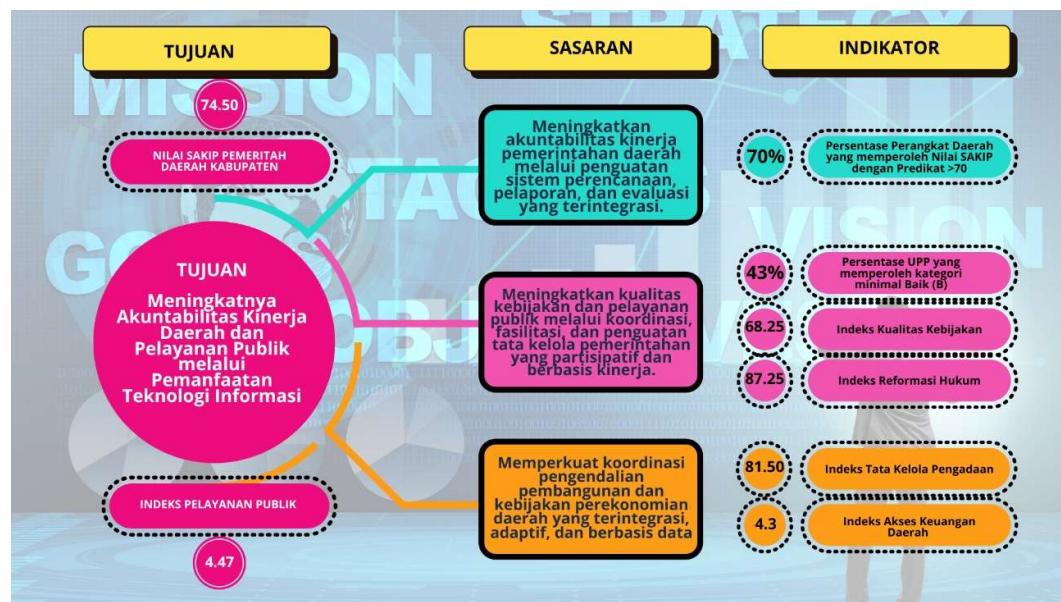
Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut, Rencana Strategis Sekretariat Daerah menetapkan tiga sasaran utama yang saling menguatkan. **Pertama**, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dilakukan melalui penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang terintegrasi, sehingga mendorong konsistensi antara perencanaan dan implementasi program pembangunan. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat di atas 70, yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan efektivitas manajemen kinerja instansi pemerintah. Pendekatan ini menekankan pentingnya tata kelola berbasis hasil (result-based management) sebagai fondasi akuntabilitas publik.

Kedua, peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik difokuskan pada penguatan peran koordinatif dan fasilitatif Sekretariat Daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berbasis kinerja. Sasaran ini diukur melalui Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Reformasi Hukum, dan persentase Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) yang memperoleh kategori minimal Baik (B), sebagai representasi mutu kebijakan dan layanan yang diterima masyarakat.

Ketiga, penguatan koordinasi pengendalian pembangunan dan kebijakan perekonomian daerah diarahkan untuk memastikan keterpaduan, adaptivitas, dan responsivitas kebijakan lintas sektor. Efektivitas sasaran ini tercermin melalui capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan dan Indeks Akses Keuangan Daerah, yang merepresentasikan efisiensi pengelolaan sumber daya dan perluasan

akses ekonomi masyarakat. Ketiga sasaran ini membentuk kerangka strategis yang terintegrasi dalam mendukung transformasi birokrasi dan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2 dan Tabel 5.

Gambar 2. Tujuan, Sasaran dan Target Indikator



Tabel 8. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra

TUJUAN RENSTRA (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TERGET	Definisi Indikator (11)
			2026 (6)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi		Nilai SAKIP Daerah	74.50	Ukuran tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
		Indeks Pelayanan Publik	4.47	Ukuran kuantitatif terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh unit pelayanan pemerintah daerah, berdasarkan aspek-aspek standar pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah melalui penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang terintegrasi.	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP dengan Predikat >70	70%	Ukuran proporsi perangkat daerah yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP di atas 70 (predikat minimal "BB") dari total seluruh perangkat daerah yang dievaluasi dalam satu tahun anggaran.
	Meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui koordinasi, fasilitasi, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berbasis kinerja.	Persentase UPP yang memperoleh kategori minimal Baik (B)	43%	Ukuran proporsi UPP yang mendapatkan nilai evaluasi pelayanan publik dengan kategori minimal "Baik" (nilai 70-80) berdasarkan hasil penilaian internal atau eksternal sesuai standar Kementerian PANRB.
		Indeks Kualitas Kebijakan	68.25	Ukuran kuantitatif terhadap mutu proses dan hasil kebijakan publik yang dihasilkan oleh perangkat daerah, mencakup aspek relevansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan keberlanjutan kebijakan. Penilaian dilakukan berdasarkan instrumen evaluasi dari LAN atau penilaian mandiri yang terstandarisasi.
		Indeks Reformasi Hukum	87.25	Ukuran tingkat pelaksanaan reformasi hukum oleh pemerintah daerah, mencakup identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi dan simplifikasi peraturan, penguatan sistem regulasi nasional, serta peningkatan kualitas pelayanan hukum. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM setiap tahun.
	Memperkuat koordinasi pengendalian pembangunan dan kebijakan perekonomian daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data	Indeks Tata Kelola Pengadaan	81.50	Ukuran kuantitatif terhadap kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penilaian dilakukan berdasarkan instrumen evaluasi dari LKPP.
		Indeks Akses Keuangan Daerah	4.3	Ukuran komposit terhadap tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di suatu daerah, mencakup dimensi ketersediaan, pemanfaatan, dan kualitas layanan keuangan. Laporan IKAD dari OJK

3.3. Kebijakan Program dan Kegiatan Utama

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan kebijakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Sesuai dengan arah Pembangunan RKPD tahun 2026, maka pada tahun 2026 arah kebijakan program aktivitas Sekretariat Daerah dipetakan berdasarkan sasaran tujuan yang telah dirumuskan.

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah melalui penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang terintegrasi. Program aktivitas yang dirumuskan mendukung pencapaian sasara strategis ini adalah :



Program Prioritas

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini:

No	Nama Program
1	Program Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2	Program Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
3	Program Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan utama dalam pelaksanaan program Sekretariat Daerah difokuskan pada penguatan akuntabilitas kinerja melalui tiga pilar strategis:

1. penguatan SAKIP, koordinasi dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi. Pada aspek penguatan SAKIP, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan berbasis kinerja, termasuk fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan Renstra dan Renja yang mengacu pada indikator SMART.

2. Di sisi koordinasi dan fasilitasi, Sekretariat Daerah berperan aktif dalam mendampingi penyusunan laporan kinerja serta mengoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) agar selaras dengan sistem pelaporan nasional.
3. Sementara itu, kegiatan monitoring dan evaluasi difokuskan pada pelaksanaan evaluasi internal terhadap program dan kegiatan berbasis kinerja, serta penyusunan rekomendasi strategis untuk peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Ketiga kelompok kegiatan ini saling terintegrasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui koordinasi, fasilitasi, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berbasis kinerja. Program aktivitas yang dirumuskan mendukung pencapaian sasara strategis ini adalah :

Program Prioritas

No	Nama Program
1	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Daerah
2	Program Penguatan Pelayanan Publik dan Inovasi Layanan
3	Program Koordinasi dan Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan

Kegiatan utama dalam pelaksanaan program Sekretariat Daerah difokuskan pada tiga pilar utama:

- 1) peningkatan kualitas kebijakan, penguatan pelayanan publik, dan koordinasi tata kelola pemerintahan. Pada aspek kualitas

kebijakan, kegiatan diarahkan untuk mendorong penyusunan kebijakan yang berbasis data dan partisipatif, melalui fasilitasi teknis, penilaian kualitas kebijakan daerah, serta bimbingan teknis analisis kebijakan dan perencanaan strategis.

- 2) Di bidang pelayanan publik, fokus kegiatan meliputi survei kepuasan masyarakat sebagai alat ukur kualitas layanan, pendampingan peningkatan mutu Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), serta fasilitasi inovasi pelayanan lintas perangkat daerah guna mendorong efisiensi dan responsivitas.
- 3) Sementara itu, dalam program koordinasi tata kelola, kegiatan difokuskan pada penyelenggaraan forum koordinasi lintas sektor, monitoring pelaksanaan kebijakan strategis, dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang bersifat lintas sektor.

Sasaran 3 : Memperkuat koordinasi pengendalian pembangunan dan kebijakan perekonomian daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data. Program aktivitas yang dirumuskan mendukung pencapaian sasara strategis ini adalah :

Program Prioritas

No	Nama Program
1	Program Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
2	Program Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah
3	Program Penguanan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan utama yang tercantum dalam tiga program strategis Sekretariat Daerah mencerminkan peran koordinatif dan fasilitatif dalam mendukung efektivitas pembangunan dan kebijakan daerah. Melalui program koordinasi dan pengendalian, dilaksanakan rapat lintas perangkat daerah untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan, disusun laporan triwulanan sebagai instrumen pemantauan, serta dilakukan sinkronisasi antara program prioritas daerah dan kebijakan nasional guna memastikan konsistensi arah pembangunan.

Dalam program kebijakan perekonomian, kegiatan difokuskan pada fasilitasi penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi daerah, penyelenggaraan forum konsultasi dengan pelaku usaha dan akademisi, serta kajian tematik terhadap isu strategis ekonomi yang relevan dengan kondisi lokal.

Sementara itu, program monitoring dan evaluasi pembangunan diarahkan untuk memperkuat sistem pengukuran kinerja melalui pengembangan dashboard capaian RPJMD, pelaksanaan evaluasi berbasis data, dan penyusunan laporan kinerja tahunan serta lima tahunan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan pembangunan ke depan.

Berikut adalah target kinerja program Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam tebel dibawah ini.

Tabel 9. Indikator Sasaran Program Sekretariat Daerah

Program	Sasaran Program	Indikator	Target 2026
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan fasilitasi dan pengendalian terhadap kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Pelayanan publik perangkat daerah	4.2
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Sekretariat Daerah	70.00
	3. Meningkatkan Pelayanan Keprotokolan Pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan yang terdokumentasi dan terarsip digital	100%
	4. Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai IKM	85.00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan	1. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah dan telah terdigitalisasi serta dapat diakses publik melalui website resmi pemerintah daerah	Persentase Produk Hukum Daerah telah dipublikasi dan bisa diakses publik	78
	2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Darah (LPDD)	3.00
	3. Tersedianya dukungan kebijakan dan fasilitasi yang mendukung kesejahteraan sosial masyarakat berbasis nilai keagamaan	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%
Program Perekonomian dan Pembanguna	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan perekonomian daerah	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan perekonomian dan Pembangunan	100%
	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	26.00
	3. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan strategis daerah	Tingkat keterlaksanaan kegiatan strategis daerah	100%

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Program

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya :

- 1) Mempedomani Resntra Sekretariat Daerah 2025-2029.
- 2) Mendukung pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Natuna. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi.
- 3) Keserasian dan keterpaduan Pembangunan baik perencanaan Pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka Pembangunan daerah.
- 4) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan Pembangunan daerah
- 5) Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu isu strategis Sekretariat Daerah

- 6) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Pemerintah Daerah menempatkan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus diwujudkan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan Kepala Daerah, Sekretariat Daerah bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan program yang mendukung peningkatan kualitas keagamaan, pendidikan, serta kompetensi masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengembangan Qur'an Center bagi santri-santri dari kecamatan menjadi program prioritas yang diarahkan untuk memperkuat pembinaan calon peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), guna meningkatkan prestasi daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

Selain itu, Sekretariat Daerah berperan dalam mendorong gerakan literasi Al-Qur'an melalui Gerakan Magrib Mengaji, yang ditetapkan sebagai salah satu gerakan sosial keagamaan prioritas dengan target pembinaan minimal 500 peserta setiap tahun. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai penguatan nilai-nilai spiritual masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter generasi muda. Di bidang pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah juga melaksanakan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah dengan target 80 peserta per tahun, yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pelayanan sosial keagamaan di lingkungan masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi masyarakat daerah, Sekretariat Daerah memfasilitasi penyediaan beasiswa perguruan tinggi melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi nasional. Program ini dirancang untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi putra-putri daerah, sekaligus mengembangkan SDM unggul yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan jangka menengah daerah. Keempat program prioritas tersebut merupakan bagian integral dari upaya Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah melalui tata kelola program yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 10. Program Perioritas Kepala Daerah

No	Nama Program	Penanunggung Jawab
1	Qur'an Center,	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Gerakan Magrib Mengaji	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	Beasiswa Perguruan Tinggi	Kerjasama Daerah

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Program Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 3 program dan 18 kegiatan dan 45 Sub kegiatan

2. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2026 adalah sebesar Rp. **73.743.000.000** yang bersumber dari APBD Kabupaten. Adapun rekapitulasi program kegiatan dan pendanaan tahun 2026 disajikan dalam tabel pada lampiran.

4.2. Cascading dan Crosscutting

Struktur cascading kinerja Sekretariat Daerah pada gambar di atas menggambarkan alur logis hubungan antara tujuan strategis, sasaran, dan indikasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing level jabatan, mulai dari Sekretaris Daerah, Asisten, hingga Eselon III. Pada level tertinggi, Sekretaris Daerah menetapkan tujuan strategis yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.”** Tujuan ini menjadi arah umum bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan terhadap perangkat daerah, khususnya terkait peningkatan tata kelola pemerintahan, kualitas kebijakan, serta efektivitas pembangunan daerah.

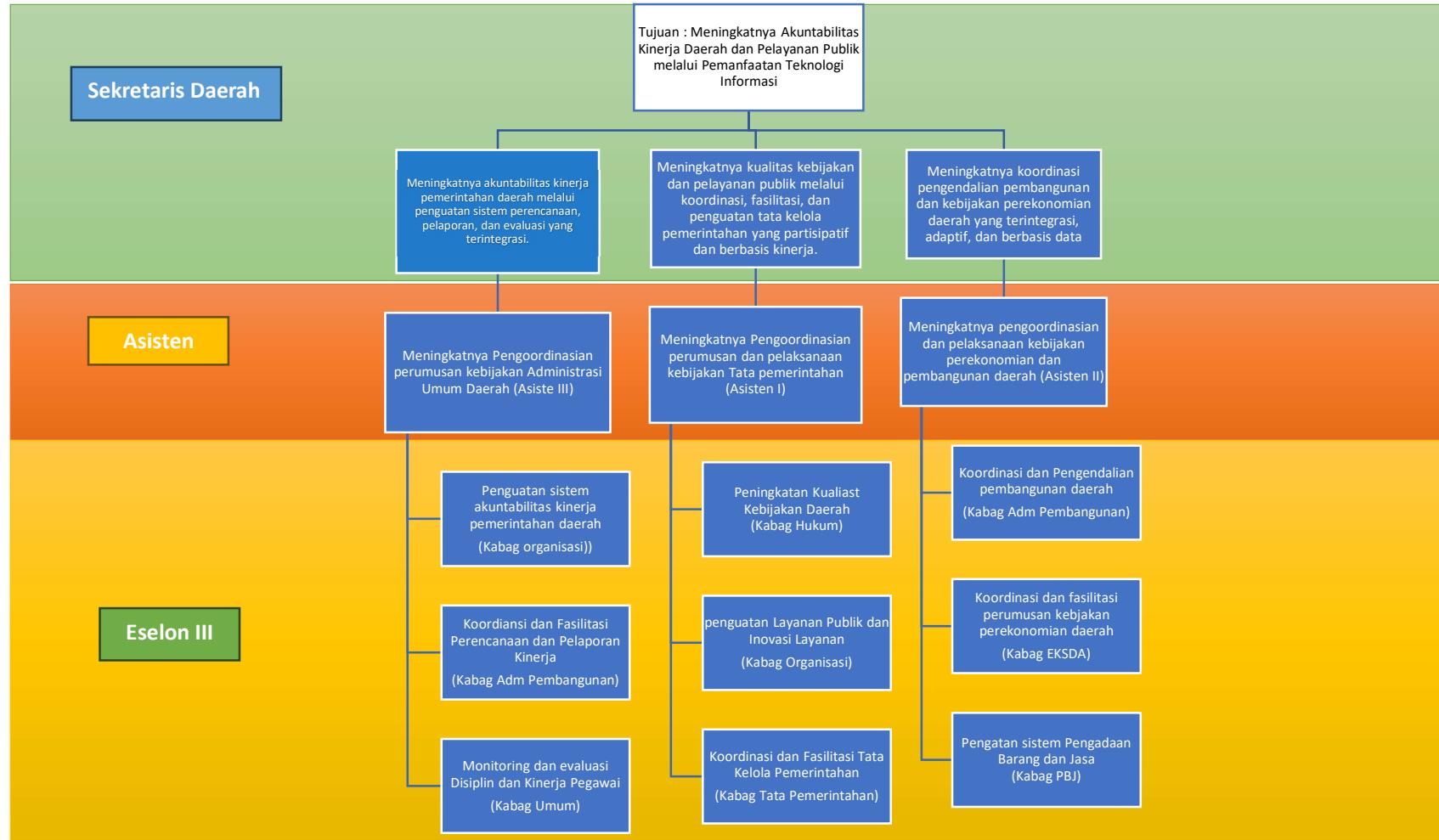
Pada level Asisten, tujuan strategis tersebut dijabarkan ke dalam tiga sasaran utama yang lebih operasional, yaitu: peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang terintegrasi; peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui koordinasi, fasilitasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan; serta penguatan koordinasi pengendalian pembangunan dan kebijakan perekonomian daerah yang terintegrasi dan berbasis data. Masing-masing sasaran ini menunjukkan fokus pembinaan dan pengendalian oleh Asisten sesuai bidang tugasnya, yaitu Administrasi Umum, Tata Pemerintahan, serta Perekonomian dan Pembangunan.

Selanjutnya, pada level Eselon III, sasaran tersebut diterjemahkan menjadi keluaran yang lebih teknis dalam bentuk program dan kegiatan. Keluaran tersebut meliputi: penguatan sistem akuntabilitas kinerja

perangkat daerah, koordinasi perencanaan dan pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah, peningkatan kualitas kebijakan daerah, penguatan layanan publik dan inovasi layanan, fasilitasi tata kelola pemerintahan, koordinasi pembangunan daerah, fasilitasi perumusan kebijakan perekonomian, serta penguatan sistem evaluasi dan monitoring pembangunan.

Dengan demikian, cascading ini menunjukkan kesinambungan antara tujuan strategis hingga kegiatan operasional, sehingga memastikan bahwa setiap level organisasi bekerja secara terpadu untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Gambar 3. Cascading Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029



Crosscutting dalam birokrasi pemerintahan merupakan pendekatan koordinatif yang digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan, irisan tugas, serta kontribusi antar-unit kerja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Melalui mekanisme ini, setiap perangkat daerah dapat melihat dengan jelas bagaimana perannya berhubungan atau beririsan dengan peran unit kerja lain, baik dalam konteks perencanaan, pelaksanaan program, maupun pencapaian sasaran kinerja. Dengan demikian, crosscutting menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program prioritas kepala daerah tidak berjalan secara parsial, melainkan secara terintegrasi dan saling menguatkan. Penyusunan matrik crosscutting diperlukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antar-fungsi dalam organisasi, khususnya dalam hal pelaksanaan program prioritas yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah. Melalui matrik ini, pemerintah daerah dapat memetakan peran koordinatif, administratif, maupun teknis yang diemban oleh masing-masing unit kerja sehingga mengurangi potensi tumpang tindih serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Selain itu, matrik crosscutting juga bermanfaat sebagai alat bantu monitoring dan evaluasi, karena memberikan dasar yang lebih sistematis dalam menilai kontribusi antar-unit terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan demikian, crosscutting menjadi instrumen yang tidak hanya mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga memastikan sinergi yang berkesinambungan antar-unit kerja sesuai mandat organisas

Tabel 8. Crosscutting Issu Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

Sasaran Kinerja Sekretaris Daerah	Arah Kebijakan dan Strategi	Area Kolaborasi	Peran Utama	Unit Kerja Terkait
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah melalui penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang terintegrasi	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Integrasi SAKIP, harmonisasi indikator, sinkronisasi perencanaan–pelaporan	Menyusun, mengharmonisasi, dan mengawal akuntabilitas kinerja PD	Bagian Organisasi, Bagian Perencanaan, Inspektorat
	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Penyusunan RKPD, Renja, cascading kinerja, laporan LKJIP	Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan & laporan kinerja	Bagian Perencanaan, Bagian Organisasi, PD teknis
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja PD	Monev, evaluasi capaian, validasi data, penyusunan rekomendasi	Melaksanakan monev dan memberikan rekomendasi kebijakan	Bagian Administrasi Pembangunan, Inspektorat, Bagian Perencanaan
2. Meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui koordinasi, fasilitasi, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berbasis kinerja	Peningkatan Kualitas Kebijakan Daerah	Penyusunan kebijakan berbasis data, FGD, harmonisasi kebijakan	Memfasilitasi penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas regulasi	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi
	Penguatan Layanan Publik dan Inovasi Layanan	Reformasi birokrasi, standar pelayanan, inovasi layanan, digitalisasi	Pengembangan & fasilitasi inovasi layanan publik	Bagian Organisasi, Diskominfo, OPD penyelenggara layanan
	Koordinasi dan Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan	Penataan kelembagaan, SOP, tata kelola berbasis good governance	Memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai regulasi	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
3. Memperkuat koordinasi pengendalian pembangunan dan kebijakan perekonomian daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data	Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Monev pembangunan, konsolidasi data program-kegiatan, evaluasi pembangunan	Mengendalikan target pembangunan daerah & memantau kemajuan	Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian, Bappeda, OPD teknis
	Koordinasi dan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Sinkronisasi kebijakan sektoral ekonomi, konsolidasi data, rapat lintas sektor	Fasilitasi perumusan kebijakan ekonomi daerah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Perekonomian, Bappeda
	Penguatan Sistem Evaluasi dan Monitoring Pembangunan	Dashboard data pembangunan, evaluasi berbasis data, rekomendasi strategis	Mengembangkan sistem evaluasi pembangunan terpadu	Bagian Administrasi Pembangunan, Diskominfo, Bagian SDA

BAB 5. PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026, merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2026, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2026. Dalam penutup dokumen Rencana Kerja tahun 2026 ini, kami menegaskan komitmen untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan sebaik-baiknya. Rencana ini merupakan hasil dari proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan rencana kerja ini akan menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dan stakeholder lainnya sangat diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan. Dengan semangat kebersamaan, kami yakin bahwa semua tantangan dapat dihadapi dan diatasi secara efektif.

Selanjutnya, kami berharap agar seluruh masyarakat Kabupaten Natuna dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan rencana kerja ini. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keberhasilan rencana kerja ini sangat bergantung pada dukungan dan kerjasama dari semua pihak.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 harus dapat berfungsi sebagai :

- 1) Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026 baik dalam lingkup program, kegiatan dan sub kegiatan.

- 2) Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Natunauntuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan bersama.
- 3) Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 ini. Semoga rencana ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Natuna

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KAB. NATUNA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN							599.999.600,00								512.120.773,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						599.999.600,00									512.120.773,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						599.999.600,00									512.120.773,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	599.999.600,00						-		512.120.773,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	599.999.600,00					Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	512.120.773,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	99.999.600,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			181.815.580,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			134.605.193,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			195.700.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
	J U M L A H							599.999.600,00							512.120.773,00			

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN HUKUM KAB. NATUNA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		BAGIAN HUKUM						450.000.000,00									500.377.527,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						450.000.000,00									500.377.527,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						450.000.000,00									500.377.527,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	450.000.000,00							-	500.377.527,00		
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	450.000.000,00								500.377.527,00	BAGIAN HUKUM	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun					690 Dokumen	296.081.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	176.136.560,00	BAGIAN HUKUM	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum					3 Kasus	139.146.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		210.240.967,00	BAGIAN HUKUM	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					100 Dokumen	14.772.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		114.000.000,00	BAGIAN HUKUM		
	J U M L A H						450.000.000,00							500.377.527,00				

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BAGIAN KERJA SAMA KAB. NATUNA TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					1 Laporan	50.001.400,00	Kab. Natuna, Bunguran Timur, Ranai Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	BAGIAN KERJA SAMA		
	J U M L A H							149.999.800,00							0,00			

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KAB. NATUNA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					3 Dokumen	4.442.320.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelepasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1.823.261.888,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
		J U M L A H						11.083.070.000,00							6.136.169.560,00			

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KAB. NATUNA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						457.815.500,00									794.883.065,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						457.815.500,00									794.883.065,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						457.815.500,00									794.883.065,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perangkat daerah dengan nilai predikat BB	-			90 Persen	122.854.100,00							-		220.883.065,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Darah (LKJP)	-			Nilai 70	122.854.100,00					Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		220.883.065,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	122.854.100,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			175.883.065,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			45.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase kepatuhan OPD melaporkan pelaksanaan pembangunan	-			90 persen	334.961.400,00						-	574.000.000,00			
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase capaian kinerja pelaksanaan pembangunan	-			90 Persen	334.961.400,00						Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	574.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	184.961.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Peningkatan Ekonomi Daerah	-			319.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	149.999.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			255.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	J U M L A H							457.815.500,00								794.883.065,00		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM KAB. NATUNA TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					10 Laporan	144.752.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		81.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	64.899.200,00					-		150.000.000,00			
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	64.899.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	150.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)																
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPakd					4 Dokumen	64.899.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		150.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan perekonomian yang diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh semua pihak terkait.	-			100 Persen	287.092.500,00						-	337.096.586,00			
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil pemantauan SDA yang disusun	-			3 Laporan	114.757.500,00					Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	105.596.586,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	114.757.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		105.596.586,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
		J U M L A H						351.991.700,00								487.096.586,00		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KAB. NATUNA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						819.997.900,00									900.125.800,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						819.997.900,00									900.125.800,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						819.997.900,00									900.125.800,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	819.997.900,00							-	900.125.800,00		
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	819.997.900,00					Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Peningkatan Ekonomi Daerah	-	-	900.125.800,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa															346.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					4 Dokumen	319.999.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Peningkatan Ekonomi Daerah	-			346.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					12 Dokumen	449.999.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Peningkatan Ekonomi Daerah	-			492.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				30 Orang	49.998.700,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Peningkatan Ekonomi Daerah	-		62.125.800,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	J U M L A H						819.997.900,00							900.125.800,00				

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN ORGANISASI KAB. NATUNA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		BAGIAN ORGANISASI						505.740.400,00									0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						505.740.400,00									0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						505.740.400,00									0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	505.740.400,00							-		0,00	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	505.740.400,00									0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-			0,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-				0,00	BAGIAN ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			0,00	BAGIAN ORGANISASI	
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	93.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			0,00	BAGIAN ORGANISASI	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	62.740.400,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			0,00	BAGIAN ORGANISASI	
	J U M L A H							505.740.400,00								0,00		

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN KAB. NATUNA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						472.999.900,00									904.576.530,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						472.999.900,00									904.576.530,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						472.999.900,00									904.576.530,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	472.999.900,00							-		904.576.530,00	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	472.999.900,00									904.576.530,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	199.999.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			443.009.000,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	152.999.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			143.932.990,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN PERIODE RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					12 Laporan	120.000.500,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		317.634.540,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
	J U M L A H							472.999.900,00							904.576.530,00			

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BAGIAN UMUM KAB. NATUNA TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					2 Unit	990.913.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		580.000.000,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1.757.826.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5 Unit	789.488.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		789.500.000,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	1.021.499.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		803.000.000,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			5 Unit	1.396.281.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		492.500.000,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	437.992.299,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		438.532.750,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-		-	3.041.684.100,00			-	-	-	-	3.059.050.286,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	49.992.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	1.165.791.300,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.182.780.000,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1.825.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.826.270.286,00	BAGIAN UMUM		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.230.886.600,00			-	-	-	-	6.216.604.287,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					42 Unit	4.717.530.600,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.702.680.000,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					6 Unit	1.551.350.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.551.800.000,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit	962.006.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		962.124.287,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	7.619.009.000,00			-	-	-	-	8.508.010.950,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/Bulan	1.132.154.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.132.154.000,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/Bulan	6.486.855.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.375.856.950,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Keruhtangan Sekretariat Daerah	-	-			-	949.360.000,00			-	-	-	-	950.000.000,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					1 Paket	500.250.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	BAGIAN UMUM		
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					1 Paket	449.110.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		450.000.000,00	BAGIAN UMUM		
X	NON URUSAN							17.632.703.115,00							15.798.970.000,00			
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							17.632.703.115,00							15.798.970.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.604.179.915,00			-	-	-	-	14.823.174.000,00	BAGIAN UMUM		
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													14.823.174.000,00	BAGIAN UMUM		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/bulan	15.604.179.915,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-					
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	210.000.000,00			-	-	-	-	124.000.000,00	BAGIAN UMUM		
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					10 Orang	210.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		124.000.000,00	BAGIAN UMUM		
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.818.523.200,00			-	-	-	-	851.796.000,00	BAGIAN UMUM		
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5 Paket	166.509.200,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		166.609.000,00	BAGIAN UMUM		
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12 Paket	1.652.014.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		685.187.000,00	BAGIAN UMUM		
	J U M L A H							48.367.446.186,00							41.199.378.673,00			